

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak Soeharto ditunjuk sebagai pejabat Presiden berdasarkan Ketetapan No. IX/MPRS/1966, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno saat Sidang Istimewa MPRS yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 1967. Soeharto ditunjuk oleh MPRS sebagai pejabat Presiden sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jendral Soeharto diangkat menjadi Presiden dan dilantik pada tanggal 27 Maret 1968 dengan berdasar kepada TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968 pada saat Sidang Istimewa MPRS V (Soebijono, *et al*, 1997: 33-39).

Pada perjalanannya Soeharto berturut-turut selalu terpilih menjadi Presiden kurang lebih sampai 32 Tahun lamanya. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan bahkan sering muncul banyak pertanyaan tentang bagaimana Soeharto mampu berkuasa selama itu. Diakui atau tidak ketika kita melihat Pemerintahan Soeharto pada saat itu, yang ikut berperan penting dalam menopang kekuasaannya adalah ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa Soeharto berkuasa bukan hanya berperan sebagai penjaga stabilitas pertahanan dan keamanan

namun juga berperan aktif dalam hal-hal lain yang bersifat non-hankam (sosial, **Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

politik, ekonomi, budaya dan sebagainya). Hal tersebut merupakan penjabaran dari konsep Dwifungsi ABRI yang berawal dari sebuah konsep “jalan tengah” yang dikemukakan Nasution. Ulf Sundhaussen (1986: 219) mengemukakan dalam buku *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI* mengenai konsep jalan tengah bahwa:

Konsep ini, sebagaimana yang telah direncanakan Soekarno, kabinet dan pimpinan Angkatan Perang akan memberikan kesempatan yang luas kepada perwira-perwira tentara atas dasar perorangan tapi sebagai eksponen tentara, “untuk berpartisipasi secara aktif dalam bidang non-militer, dan dalam menentukan kebijakan nasional pada tingkat yang paling tinggi, termasuk dalam bidang seperti keuangan negara, ekonomi dan sebagainya”.

Pada dasarnya konsepsi ”jalan tengah” yang pernah dilontarkan Nasution memberi roh bagi militer untuk memasuki wilayah sipil. Dwi Pratomo Yulianto (2005:36) dalam bukunya mengutip perkataan Nasution bahwa tentara :

...bukan sekedar “alat sipil” seperti di negara-negara Barat, juga bukan sebuah “rejim militer” yang mendominasi kekuasaan negara, melainkan merupakan salah satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat, kekuatan demi perjuangan rakyat yang bekerja bahu-membahu dengan kekuatan lain yang dimilikinya.

UU No.20 Tahun 1982 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan”, pada salah satu pasalnya menyebutkan bahwa, “Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial” (Dwi Pratomo Yulianto. 2005: 37). Hal tersebut memberi basis legitimasi

kepada militer untuk berkiprah di bidang sosial politik. Soeharto yang merancang

sekaligus mengaplikasi aturan itu telah memberi lapangan seluas-luasnya kepada

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

militer untuk memainkan peran-peran politik, ekonomi, sosial dan birokrasi dengan bungkus dinamisator dan stabilisator.

Pelaksanaan fungsi militer sebagai kekuatan sosial-politik itu lambat laun memunculkan ABRI dalam bidang kekaryaan. Meskipun bidang ini tidak sama dengan kemiliteran yang selalu di hadapinya, namun sangat erat hubungannya dengan masalah HANKAMNAS. Dalam kerangka yang lebih luas, kekaryaan ABRI pun diarahkan untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945 terlaksananya Pembangunan Nasional (Disjarah TNI-AD. 1972: 403). Kekaryaan militer perlahan tapi pasti mulai menyebar diberbagai bidang sosial, budaya, politik, ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Hal tersebut diharapkan bisa membantu pemerintahan Soeharto dalam membangun pemerintahan di Indonesia menjadi solid. Dapat dikatakan berperannya militer dalam setiap elemen pemerintahan ini sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto (Nasution, 1971: 82).

Implementasi kebijakan Dwifungsi ABRI ini awalnya bertujuan untuk terbentuknya sebuah profesionalisme militer di Indonesia. Seperti halnya dalam kata pengantar buku *Dwifungsi ABRI* yang ditulis oleh Soebijono, *et al*, Yahya A. Muhaimin mengungkapkan bahwa ada dua macam pendekatan untuk melihat profesionalisme militer ini yaitu profesionalisme konservatif dan profesionalime baru. Kebijakan Dwifungsi ABRI yang digunakan pada masa pemerintahan

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Soeharto ini merujuk kepada pemahaman profesionalisme baru dimana militer yang professional adalah militer yang memiliki kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab pada bidang hankam dan sekaligus juga pada bidang non-hankam (sosial, politik, ekonomi dan sebagainya). Akan tetapi tujuan awal itu dalam perjalanannya mengalami beberapa masalah, salah satunya seperti dalam bidang ekonomi yang melibatkan ABRI untuk membantu proses nasionalisasi aset-aset vital pemerintah, tapi justru menjadikan ABRI sebagai penguasa atau pemimpin dari aset tersebut. Bahkan pada perjalanannya hal tersebut digunakan sebagai lahan bisnis para pihak militer. Seperti yang pernah dikemukakan Nasution pada awal perkembangan Dwifungsi ABRI khususnya dalam hal kekaryaan menyatakan bahwa ABRI jangan sampai salah menafsirkan mengenai Dwifungsi ABRI. Menurut Nasution, meskipun ABRI diberi keleluasaan dalam bidang sosial-politik bukan berarti seorang ABRI dapat sekaligus merangkap di bidang eksekutif, legislatif atau seperti yang sering dikatakan dengan “penguasa” dan “pengusaha” (Nasution, 1971:22).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto bukannya tidak menuai banyak kritik. Namun upaya untuk mengkritisi pemerintahan pada saat itu sangat diminimalisir oleh pemerintah supaya tercipta kestabilan negara walaupun dengan cara yang represif. Pada era 1990-an, kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto pada saat itu sudah tidak lagi dalam jalurnya dan bahkan banyak terjadi penyelewengan dan

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

penyalahgunaan wewenang dari kebijakan Dwifungsi ABRI itu sendiri. Seperti kebijakan yang dikeluarkan Soeharto misalnya, banyak yang telah mengetahui bahwa Soeharto sering menggunakan ABRI untuk mengamankan orang-orang yang membangkang dan para pesaing politiknya yang dianggap bisa mengganggu stabilitas kepemimpinan Soeharto. Bahkan orang-orang terdekat Soeharto pada saat itu diangkat menjadi pemimpin-pemimpin dalam tubuh militer, seperti Wismoyo, Feisal Tanjung, Prabowo dan yang lainnya (Ricklefs, 2008: 675-681).

Menjelang akhir dari pemerintahan Soeharto mulai banyak pihak yang mengkritisi kepemimpinan Soeharto dan mulai maraknya aksi demonstrasi yang merenggut korban jiwa, seperti terjadinya Peristiwa Mei 1998 yang telah merenggut nyawa beberapa mahasiswa saat berdemonstrasi (Ricklefs, 2008: 689-692). Salah satu yang sering dikemukakan dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut adalah agar Soeharto dapat mundur dari jabatan Presiden dan menghapuskan Dwifungsi ABRI yang dianggap tidak lagi tepat untuk menuju kearah profesionalisme militer. Rakyat mulai jenuh dengan pengaruh militer yang sangat kuat pada masa pemerintahan Soeharto ini, sehingga menimbulkan banyak masalah. Bahkan untuk menata kembali tugas-tugas militer pasca turunnya pemerintahan Soeharto sangat sulit untuk direalisasikan dan mungkin itu akan menjadi pekerjaan rumah yang panjang di masa depan.

Hal di atas merupakan gambaran umum mengenai penerapan dan pelaksanaan kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto.

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Ketertarikan penulis terhadap permasalahan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai latar belakang, pelaksanaan dan perkembangan,serta dampak yang terjadi akibat dari penerapan kebijakan Dwifungsi ABRI, karena kebijakan tersebut disinyalir memberikan legitimasi dan ruang gerak yang lebih terhadap militer untuk masuk dan menduduki ranah-ranah sipil yang juga digunakan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Adapun alasan mengenai pemakaian kurun waktu 1966-1998 tersebut adalah masaa-masa ketika Soeharto mulai menduduki jabatan sebagai pemimpin negara dan pemerintahan sampai Soeharto turun dari jabatannya.

Selain itu, literatur kajian terhadap judul ataupun tema yang sejenis dengan judul yang diangkat oleh peneliti di Jurusan Pendidikan Sejarah UPI sampai sekarang masih belum ada yang menulisnya, sehingga hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu hal yang baru dan dapat memperkaya kajian Sejarah Orde Baru dan Politik di Jurusan pendidikan Sejarah UPI.

Berdasarkan beberapa latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA (Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998)**. Maksud yang terkandung pada judul di atas adalah implementasi, tanggapan, dan sikap yang diperlihatkan oleh militer di Indonesia yang khususnya

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

terlihat pada masa pemerintahan Soeharto dalam penerapan kebijakan Dwifungsi ABRI untuk menuju kearah profesionalisme militer.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan utama yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana Kebijakan Dwifungsi ABRI ini menjadi alat legitimasi militer dalam menjalankan fungsi sosial-politiknya pada tahun 1966-1998 yang berdasarkan dari studi tentang kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto.

Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Dwifungsi ABRI dan perkembangannya pada tahun 1966-1998?
2. Bagaimana pelaksanaan dan tanggapan (pihak militer dan non-militer) terhadap kebijakan Dwifungsi ABRI tahun 1966-1998?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan Dwifungsi ABRI terhadap peran-peran militer di Indonesia pada bidang pertahanan keamanan (Hankam) dan Non-Hankam tahun 1966-1998?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan tentang Profesionalisme Militer di Indonesia berdasarkan studi tentang kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto.

Adapun tujuan-tujuan khususnya antara lain:

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya Dwifungsi ABRI dan perkembangan Dwifungsi ABRI tahun 1966-1998.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan dan tanggapan (pihak militer dan non-militer) terhadap kebijakan Dwifungsi ABRI tahun 1966-1998.
3. Mendeskripsikan pengaruh kebijakan Dwifungsi ABRI terhadap peran-peran militer di Indonesia pada bidang pertahanan keamanan (Hankam) dan Non-Hankam tahun 1966-1998.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya penulisan sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan yang berkaitan dengan sejarah Indonesia tahun 1966-1998.
2. Menambah wawasan seputar Konsep Dwifungsi ABRI yang masih jadi perdebatan hingga sekarang.
3. Titik fokus dalam penelitian ini adalah mengenai konsep Dwifungsi ABRI dan peran-peran militer di Indonesia, sehingga secara teoritik hasil dan

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



manfaatnya mampu memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam ranah sejarah kemiliteran dan sejarah politik.

4. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam.
5. Mempunyai manfaat tersendiri bagi penulis dalam pengembangan nalar dan intelektual.

### 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan dan Kesimpulan. Adapun fungsi dari pembagian ini bertujuan memudahkan penulisan dan sistematisasi dalam memahami penulisan.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya berisi penjelasan mengapa masalah tersebut diteliti dan penting untuk diteliti, serta mengenai alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Pada bab ini juga berisi perumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis dari berbagai referensi yang berhubungan dengan “*MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA (Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998)*”. Dalam bagian ini penulis akan

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

menjelaskan beberapa teori dan konsep yang relevan sebagai alat pisau analisis dalam interpretasi penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian, membahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan cara penulisan. Dengan langkah penelitian yang dimulai dari Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Semua prosedur dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan sampai pada tahap penulisan penelitian akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV Pembahasan, memuat uraian penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan dibahas tentang *MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA (Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998)*. Maksud yang terkandung dalam judul tersebut adalah implementasi, tanggapan, dan sikap yang diperlihatkan oleh militer di Indonesia, khususnya terlihat pada masa pemerintahan Soeharto dalam penerapan kebijakan Dwifungsi ABRI untuk menuju kearah profesionalisme militer.

Bab V Kesimpulan, merupakan inti jawaban serta analisis penulis terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan merupakan hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan hasil penelitian serta interpretasi penulis mengenai inti dari pembahasan. Pada bab ini penulis

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapatkan setelah mengkaji permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.



**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)